



**ANALISIS PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN  
DAERAH RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO EFISIENSI  
PAJAK DAERAH TERHADAP EFISIENSI BELANJA  
DAERAH PADA PEMERINTAH KAB/KOTA  
DI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**HETI PARAMITA**  
NPM 1515100250

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : HETI PARAMITA  
NPM : 1515100250  
PROGRAM STUDI : SI ( STRATA SATU )  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN  
KEUANGAN DAERAH RASIO EFEKTIVITAS DAN  
RASIO EFISIENSI PAJAK DAERAH TERHADAP  
EFISIENSI BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH  
KAB/KOTA DI SUMATERA UTARA

MEDAN, SEPTEMBER 2019

**KETUA PROGRAM STUDI**

(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

**DEKAN**



(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum)

**PEMBIMBING I**

(Oltarini Khamilah Seg, SE., M.Si)

**PEMBIMBING II**

(Rusyda Nazhirah Yunus, SS., M.Si)





**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH  
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

**PERSETUJUAN UJIAN**

NAMA : HETI PARAMITA  
NPM : 1515100250  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : SI ( STRATA SATU )  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN  
KEUANGAN DAERAH RASIO EFEKTIVITAS DAN  
RASIO EFISIENSI PAJAK DAERAH TERHADAP  
EFISIENSI BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH  
KAB/KOTA DI SUMATERA UTARA

**KETUA**

( Anggi Pratama Nandito, SE., M.Si )

**ANGGOTA II**

(Rusyda Nazhirah Yunus, SS., M.Si)

MEDAN, SEPTEMBER 2019

**ANGGOTA I**

(Oktarini Khamilah Srg, SE., M.Si)

**ANGGOTA III**

(Drs Abdulah Hasyim BR, Ak, MM)

**ANGGOTA IV**

(Junawan, SI, M.Si)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heti Paramita  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 18 Januari 1997  
NPM : 1515100250  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat : Jalan Medan-Binjai Km 16,5

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Schubungan dengan hal ini, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Agustus 2019

Hormat Saya



(Heti Paramita)



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HETI PARAMITA

NPM : 1515100250

Program Studi : AKUNTANSI

Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN  
DAERAH RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO EFISIENSI PAJAK  
DAERAH TERHADAP EFISIENSI BELANJA DAERAH PADA  
PEMERINTAH KAB/KOTA DI SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Agustus 2019



(HETI PARAMITA)





# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 PO.BOX.1099 Telp. (061) 8455571 Medan  
 Email : fasosa@pancabudi.ac.id http://www.pancabudi.ac.id

### BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Di hari ini, Selasa Tanggal, 3 Bulan, September Tahun, 2019, telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau Pada Program Studi Akuntansi Semester Akademik 2015 bagi mahasiswa/i atas nama :

Nama : Aeti Paramita  
 NIM : 1515100250  
 Program Studi : Akuntansi  
 Tanggal Ujian : Selasa, 3 September 2019  
 Judul Skripsi Lama : Pengaruh Rasio kemandirian keuangan Daerah Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi pajak daerah terhadap Efisiensi Belanja daerah pada pemerintah kab/kota di Sumatera Utara  
 Judul Skripsi Baru : Analisis pengaruh Rasio kemandirian keuangan daerah rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi pajak daerah terhadap Efisiensi belanja daerah pada pemerintah kab/kota di Sumatera Utara

Dinyatakan benar bahwa dalam pelaksanaan ujian Meja Hijau mahasiswa tersebut diatas telah terjadi perubahan judul skripsi yang telah dikendaki oleh Panitia Ujian Meja Hijau.

JABATAN	NAMA DOSEN	TANDA TANGAN
Ketua Penguji/ Ketua Program Studi	Anggi Pratama Nasution, SE, M.Si	
Anggota I/ Pembimbing I	Octarina Khamilah Srg, SE, M.Si	
Anggota II/ Pembimbing II	Ruzda Nazhairah Yunus, SS, M.Si	
Anggota III/ Penguji I	Drs. Abdul Hasyim BB, Ak. MM	
Anggota IV/ Penguji II	Junawan, SE, M.Si	

Telah Diperiksa oleh LPMU  
dengan Plagiarisme... 57...%

15 AGUSTUS 2019

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 15 Agustus 2019  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
DI -  
Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HETI PARAMITA  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 18 Januari 1997  
Nama Orang Tua : wiginin  
No. P. M : 1515100250  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Akuntansi  
No. HP : 08566234271  
Alamat : Jl. Medan-Binjai Km. 16.5

Saya bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pajak Daerah terhadap Efisiensi Belanja Daerah pada Pemerintahan Kab/Kota di Sumatera Utara, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Telampir surat keterangan bebas laboratorium
- Telampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Telampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Telampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna perijilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Telampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,100,000</b>

Uk.T. 8-12 Rp. 1.750,000  
Rp. 3,850,000  
df 15/08-19

Ukuran Toga : S



Hormat saya  
*Heti Paramita*  
HETI PARAMITA  
1515100250

TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 580/Perp/Bp/2019

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT Perpustakaan  
Medan, 15 AUG 2019  
Perpustakaan



- Permohonan ini sah dan berlaku bila :
- Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan (Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asl) - Mhs.ybs.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

FM-BPAA-2012-038

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Pembimbing I : Oktarini Khamilah, Srg, SE, M.Si  
 Pembimbing II : Rusyda Nazharah Yunus, SS, M.Si  
 Mahasiswa : HETI PARAMITA  
 Program Studi : Akuntansi  
 Pokok Mahasiswa : 1515100250  
 Pendidikan : S1  
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah, rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi pajak daerah terhadap Efisiensi Belanja daerah pada pemerintah kab/kota di Sumatera Utara

NO	WAKTU	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1	7-19	Perbaiki jadwal waktu penelitian Hasil penelitian seperti uji normalitas, uji t dan uji determinasi, dan pembahasan serta tegaskan kalimatnya. Kesimpulan & perbaikan & susun dgn hasil penelitian	<i>[Signature]</i>	
2	7-19	Perbaiki tabel waktu penelitian, daftar isi, Pembahasan & jelaskan kalimatnya, Kesimpulan & daftar pustaka.	<i>[Signature]</i>	
3	7-19	Perbaiki dan perbaiki identitas isi dan latar belakang masalah dan pembahasan Arahan sidang Meja Hijau	<i>[Signature]</i>	

Pembimbing I  
*[Signature]*  
 Khamilah Srg, SE, M.Si

Medan, 16 Juli 2019  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,

*[Signature]*  
 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Pembimbing I : Oktarina Khamidah Srg, SE, M.Si  
 Pembimbing II : Rusyda Nazhirah Yunus, S.S, M.Si  
 Mahasiswa : HETI PARAMITA  
 Program Studi : Akuntansi  
 Pokok Mahasiswa : 1515100250  
 Pendidikan : S1  
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah rasio efektivitas dan rasio Efisiensi pagaw daerah terhadap Efisiensi Belanja daerah pada pemerintah Kab/kota di Sumatera utara

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
31-7-2019	Perbaiki Paragraf Perbaiki Abstrak Perbaiki Kata Pengantar Perbaiki Daftar Isi Perbaiki Daftar Tabel	Ruf	
31-7-2019	Kutipan & dalam Bab I, II, III sesuaikan dengan Daftar Pustaka. Kata Depan gunakan huruf kecil Kata asing Tulis miring	Ruf	
31-7-2019	Sesuaikan Rumusan Masalah dengan Kesimpulan Tabel Lampiran dirapikan	Ruf	
31-7-2019	ACE sedang skripsi	Ruf	

Medan, 16 Juli 2019  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Oktarini, Khamilah, Srg, SE, M.Si  
 Dosen Pembimbing II : Rusyda, Nashirah, Yunus, SS, M.Si  
 Nama Mahasiswa : HETI PARAMITA  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100250  
 Bidang Pendidikan : S-1  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pajak daerah terhadap Efisiensi Belanja Daerah Pada Pemerintah KAB / KOTA DI SUMATERA UTARA

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
03-19	Perbaiki latar belakang dan Identifikasi masalah, teori di bab 2, Kerangka konseptual, dan Jenis penelitian.	<i>[Signature]</i>	
03-19	Perbaiki latar belakang masalah tabel referensi operasional, Daftar pustaka, tabel peneliti terdahulu	<i>[Signature]</i>	
03-19	Perbaiki dan perbagus latar belakang masalah dan kerangka konseptual serta daftar pustaka Acc & seminar proposal	<i>[Signature]</i>	

Dosen Pembimbing I  
*[Signature]*  
 Oktarini, Khamilah, Srg, SE, M.Si

Medan, 13 Maret 2019  
 Diketahui/Dijetujui oleh :  
 Dekan,

*[Signature]*  
 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.







UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing I : Octarini Khamilah Srg., SE, M.Si  
Dosen Pembimbing II : Rusyda Nazhirah Yunus., SS, M.Si  
Nama Mahasiswa : HETI PARAMITA  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100250  
Tingkat Pendidikan : S-1  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi pajak daerah terhadap Efisiensi Belanja Daerah pada Pemerintah KAB/KOTA Di SUMATERA UTARA

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
11-09-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Tabel perbaikan</li> <li>- Tulisan Bahasa Asing di miringkan</li> <li>- Beberapa kata ada yang tidak pas penempatannya</li> <li>- Konjungsi atau kata hubung huruf kecil di awal seperti dan, dalam</li> <li>- Penulisan kutipan, nama belakangnya saja yang dibuat</li> <li>- Nama orang huruf awal huruf besar</li> <li>- Font tabel Definisi operasional perbaikan</li> <li>- Coba baca lagi cara penulisan daftar pustaka melalui jurnal</li> </ul>	  	
12-09-2018	Acc proposal		

Medan, 29 Maret 2019  
Diketahui/Disetujui oleh :  
Dekan,

  
Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.  


Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

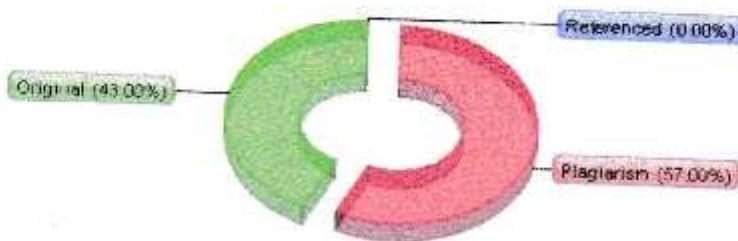
Analyzed document: 13/08/2019 14:44:05

"HETI PARAMITA\_1515100250\_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- # 101 wrds: 6627 <https://docplayer.info/146951383-Bab-III-metode-penelitian-deskripsi-kuantitatif-yaitu-met...>
- # 74 wrds: 4932 <https://id.123dok.com/document/eqodm0z1-analisis-typaper-effect-dana-alokasi-umum-dau-pen...>
- # 73 wrds: 4872 <http://eprints.uny.ac.id/26856/1/15%20FULL%20SKRIPSI.pdf>

Show other Sources:}

Processed resources details:

380 - Ok / 93 - Failed

Show other Sources:}

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



[not detected]

[not detected]

[not detected]

Excluded Urls:





# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax: 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : HETI PARAMITA

Jenis/Tgl. Lahir : Medan / 18 Januari 1997

Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100250

Program Studi : Akuntansi

Kontribusi : Akuntansi Sektor Publik

Nilai Kredit yang telah dicapai : 125 SKS, IPK 3.44

Yang ingin mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul SKRIPSI	Persetujuan
Analisis Unconditional Grant dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara	<input type="checkbox"/>
Pengaruh PAD, DAU dan Silpa Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara	<input type="checkbox"/>
Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pajak Daerah Terhadap Efisiensi Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	<input checked="" type="checkbox"/>

Yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

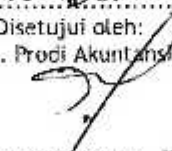


  
 ( Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D. )

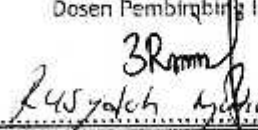
Medan, 19 Desember 2018

Pemohon,  
  
 ( Heti Paramita )

Nomor : .....  
 Tanggal : .....  
 Disahkan oleh :  
 Dekan  
  
 ( Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. )

Tanggal : 20 Desember 2018  
 Disetujui oleh:  
 Ka. Prodi Akuntansi  
  
 ( Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si )

Tanggal : 18-12-2018  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I:  
  
 ( Olfari Khawarizma Srs, SE, M. Si )

Tanggal : 15-1-2019  
 Disetujui oleh:  
 Dosen Pembimbing II:  
  
 ( Rusyach Mulyas S.d. M.Si )

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pajak Daerah Terhadap Efisiensi Belanja Daerah pada Pemerintah Kab/Kota di Sumatera Utara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun sample sebanyak 11 Kabupaten dan 4 Kota dengan total sebanyak 75 dengan tahun pengamatan selama 5 tahun sebagai sample. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program spss versi 20.0. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Medan yang berupa laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2012-2016. Hasil menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi belanja daerah, dimana  $T_{hitung} 0,471 < T_{tabel} 1,666$  signifikansi  $0,639 > 0,05$ , rasio efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi belanja daerah, dimana  $T_{hitung} -2681 < T_{tabel} 1,666$  signifikansi  $0,009 < 0,05$ , rasio efisiensi pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi belanja daerah, dimana  $T_{hitung} -2529 < T_{tabel} 1,666$  signifikansi  $0,014 < 0,05$ . Dan hasil menunjukkan bahwa secara simultan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi belanja daerah.

**Kata kunci : Belanja Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Pajak Daerah**



## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of the Regional Financial Independence Ratio Effectiveness Ratio and Efficiency Ratio of Local Taxes to the Efficiency of Regional Expenditures in the Regency / City Government in North Sumatra. The sample used in this study was taken using a purposive sampling method. The samples are 11 districts and 4 cities with a total of 75 with 5 years of observation as a sample. The analysis technique in this study uses multiple linear regression analysis with the help of the SPSS version 20.0 program. This research uses quantitative research that is associative in nature. The data used in this study are secondary data obtained from the Central Statistics Agency of Medan in the form of 2012-2016 local government financial reports. The results show that the ratio of regional financial independence does not have a positive and significant effect on the efficiency of regional spending, where Thitung 0.471 <Table 1.666 significance 0.639> 0.05, effectiveness ratio has a positive and significant effect on the efficiency of regional spending, where Thitung - 2681 <Table 1.666 significance 0.009 <0.05, the ratio of local tax efficiency has a positive and significant effect on the efficiency of regional spending, where Thitung - 2529 <Table 1.666 is significance of 0.014 <0.05. And the results show that simultaneous independence of local financial ratios, effectiveness ratios and local tax efficiency ratios have a positive and significant effect on the efficiency of regional spending.*

**Keywords:** *Regional Expenditure, Regional Financial Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Local Tax Efficiency Ratio*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena atas berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang penulis beri judul “Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pajak Daerah Terhadap Efisiensi Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, mengenai isi maupun dalam pemakaian bahasa. Hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE.,MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
4. Ibu Oktarini Khamilah Srg, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing 1 (satu) yang sudah banyak memberikan ilmu dan membantu memberikan kritik dan saran terhadap skripsi ini hingga selesai .
5. Ibu Rusyda Nazhirah Yunus, SS.,M.Si selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Kantor Badan Pusat Statistik yang telah banyak membantu dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.



7. Teristimewa penulis persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Wagimin dan Ibunda Tuginem. Terima kasih telah merawat, membimbing, dan memberikan dukungan moril dan material serta memberikan doa kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini dengan baik. Dan juga abang dan kakak ku tercinta yang banyak sekali membantu penulis dalam segala hal.
8. Teruntuk teman-teman akuntansi kelas siang B terutama astrinatasi, khairiah, murniati, nurul aulia dan desty rinika, terima kasih banyak selama ini telah membantu penulis dan member motivasi bagi penulis dan menjadi teman baik.

Akhirnya, penulis hanya biasa berharap semoga upaya penulisan menyajikan penelitian ini dapat bimbingan dan pengarahan yang lebih baik agar nantinya dapat dimengerti dan lebih baik dalam penulisan selanjutnya serta dapat juga bermanfaat bagi rekan-rekan yang lain yang berminat dalam kajian penelitian yang serupa. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah memberikan dorongan terhadap penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Medan, September 2019

Penulis

Heti Paramita

1515100250

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori.....	10
1. Belanja Daerah .....	10
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	13
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	18
4. Rasio Efektivitas.....	20
5. Rasio Efisiensi .....	21
6. Pendapatan Asli Daerah .....	22
B. Penelitian Sebelumnya.....	27
C. Kerangka Konseptual.....	29
D. Hipotesis.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
C. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data .....	32
D. Teknik Pengumpulan Data .....	33

E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	34
F. Teknik Analisa Data.....	35
1. Uji Asumsi Klasik.....	35
2. Regresi Linier Berganda.....	37
3. Uji Kesesuaian.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Hasil Penelitian .....	40
1. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.....	40
2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara .....	42
3. Data Penelitian.....	43
4. Uji Statistik Deskriptif.....	43
5. Uji Asumsi Klasik .....	45
6. Pengujian Hipotesis .....	53
a. Uji Pengaruh Parsial (Uji t).....	53
b. Uji Pengaruh dalam Simultan (Uji F) .....	54
c. Pengujian Determinasi .....	55
B. Pembahasan.....	59
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>60</b>
A. Simpulan .....	60
B. Saran.....	61



## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1.1 Anggaran PAD, Realisasi PAD, Realisasi DAU dan Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, dalam kurun waktu tahun 2012-2016.....	4
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan.....	19
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan.....	20
Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan .....	22
Tabel 2.4 Daftar Penelitian Sebelumnya.....	27
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	31
Tabel 3.2 Sampel Penelitian.....	33
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel.....	34
Tabel 4.1 Deskriptif Statistik.....	44
Tabel 4.2 <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i> .....	45
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	48
Tabel 4.4 Pengujian Autokorelasi .....	51
Tabel 4.5 Coefficients <sup>a</sup> .....	51
Tabel 4.6 ANOVA <sup>b</sup> .....	54
Tabel 4.7 Model Summary <sup>b</sup> .....	55

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	30
Gambar 4.1 Grafik Normal P-Plot.....	46
Gambar 4.2 Histogram.....	47
Gambar 4.3 <i>Scatterplot</i> Heterokedastisitas.....	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengolahan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena sebuah daerah dapat menjadi kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintah. Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Penilaian Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sasaran yang di harapkan sebagai fungsi belanja.

Menurut (Ardhini, 2011:2), menyatakan bahwa Keberhasilan otonomi daerah juga tidak terlepas dari kinerja keuangan. Kinerja keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan Rasio keuangan daerah yang dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi keuangan daerah



Namun realitanya menunjukkan bahwa belum sepenuhnya pemerintah daerah di Indonesia berhasil mencapai tingkat kemandirian keuangan yang di harapkan. Masih banyak pemerintah Kabupaten/Kota di daerah yang sangat bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Salah satu pemerintah daerah yang masih menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam porsi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya adalah pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung.

Warsito, dkk (2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penangannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolute, tetapi relative. Artinya tidak ada standar baku yang di anggap baik oleh rasio ini.

Menurut (Ardhini, 2011:3) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu daerah yang diukur dengan besarnya PAD terhadap jumlah total pendapatan daerah, sehingga memunculkan permasalahan suatu daerah yang dikatakan mandiri dapat meningkatkan jumlah belanja modal untuk pelayanan publik. Menurut (Mahmudi, 2010:170) menyatakan bahwa Semakin

tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah.

Menurut (Ardhini, 2011:4) menyatakan bahwa “Rasio Keuangan Efektivitas daerah adalah salah satu cara membandingkan jumlah realisasi PAD dan target PAD yang dihitung berdasarkan alokasi PAD tahun bersangkutan, sehingga suatu daerah dapat dikatakan efektif apabila jumlah realisasi pendapatan lebih tinggi daripada target yang ditetapkan”. Menurut (Sularso,dkk, 2011:113) menyatakan bahwa kemampuan dan efektivitas keuangan daerah dalam merealisasikan PAD nya akan memperlihatkan tingkat kemandirian daerah dalam mengelola potensi dan manajemen keuangan daerah.

Rasio Efisiensi Pajak Daerah adalah salah satu cara membandingkan total pengeluaran daerah dengan total pendapatan daerah. Suatu daerah dikatakan efisien jika pengeluaran daerah kecil dan total pendapatannya tinggi. Menurut (Mahmudi,2010:171) menyatakan bahwa “Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal dapat diperoleh hasil yang diinginkan, jika nilai efisiensi tinggi maka jumlah belanja diindikasikan sangat tinggi”.

Berikut ini adalah data anggaran PAD, realisasi PAD, realisasi DAU dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, dalam kurun waktu tahun 2012 sampai tahun 2016.

Tabel 1.1

**Anggaran PAD, Realisasi PAD, Realisasi DAU dan Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, dalam kurun waktu tahun 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran PAD (Jutaan)</b>	<b>Realisasi PAD (Jutaan)</b>	<b>Realisasi DAU (Jutaan)</b>	<b>Belanja Daerah (Jutaan)</b>
2012	2,290,433	1,975,001	8,655,661	14,404,989
2013	2,787,783	2,182,487	10,433,611	17,058,369
2014	2,770.565	2,674,849	10,764,255	18,057,802
2015	3,225,572	2,991,590	10,764,255	21,733,122
2016	3,524,308	3,135,493	12,116,336	23,515,432

*Sumber: sumut.bps.go.id, 2019*

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 anggaran PAD sebesar Rp. 2,290,433 juta sedangkan realisasi PAD menurun sebesar Rp.1,975,001 juta. Tahun 2013 anggaran PAD sebesar Rp.2,787,783 juta sedangkan realisasi PAD menurun sebesar Rp.2,182,487 juta. Tahun 2014 anggaran PAD sebesar Rp.2,770,565 juta sedangkan realisasi PAD menurun sebesar 2,674,849 juta. Tahun 2015 anggaran PAD sebesar Rp.3,225,572 juta sedangkan realisasi PAD 2,991,590 juta. Tahun 2016 anggaran PAD sebesar Rp.3,524,308 juta sedangkan realisasi PAD menurun sebesar Rp.3,315,493 juta, hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan Provinsi Sumatera Utara untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih tergolong kecil jika dibanding dengan Provinsi lain diluar Provinsi Sumatera Utara.

Data tabel 1.1 menunjukkan dari tahun 2012 sampai 2016 Dana Alokasi Umum (DAU) lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih tergantung kepada dana dan bantuan dari pemerintah pusat



yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin. Berbeda halnya dengan Provinsi Bali di tahun 2002-2006 yang masuk dalam kategori keuangan yang cukup efektif yang sebelumnya dilakukan penelitian oleh Dwirandra tentang Efektivitas dan Kemandirian keuangan daerah otonomi Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan analisis rasio efektivitas dan analisis rasio kemandirian sebagai alat analisis. Rasio efektivitas keuangan berkisar dari 75,01% sampai dengan di atas 100%. Daerah otonom Kabupaten/Kota di Bali dalam periode dua tahun terakhir masuk dalam kategori kemandirian keuangan yang sedang (rasio Kemampuan Keuangan Daerah lebih dari 50% sampai dengan 75%) dan rendah (rasio Kemampuan Keuangan Daerah lebih dari 25% sampai dengan 50%). Maka dapat disimpulkan PAD provinsi Sumatera Utara masih sangat rendah dibandingkan dengan PAD di provinsi Bali.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas identifikasi masalahnya adalah :

- a. Berdasarkan data pada Badan pusat statistik menunjukan masih kurangnya pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tergolong kecil dibandingkan dengan provinsi lain diluar Provinsi Sumatera Utara terutama dalam menggali pajak.

- b. Ketergantungan pemerintah daerah kepada dana dan bantuan dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin.

## **2. Batasan Masalah**

Mengingat masalah yang dihadapi maka agar penelitian ini lebih terarah dan pembahasannya tidak menyimpang penulis membatasi pembahasan hanya pada analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi pajak daerah dan efisiensi belanja daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, dalam waktu 2012-2016.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang menjadi dasar dalam penyusunan Skripsi ini, yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara ?
2. Apakah terdapat pengaruh rasio efektivitas terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara ?
3. Apakah terdapat pengaruh rasio efisiensi pajak daerah terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara ?
4. Apakah terdapat pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi pajak daerah secara simultan terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera ?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio efektifitas terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio efisiensi pajak daerah terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan rasio efisiensi pajak daerah secara simultan terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi dasar dalam kajian berikutnya khususnya tentang analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan rasio efisiensi pajak



daerah terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara.

#### **b. Manfaat Praktis**

1. Bagi pemerintahan di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara diharapkan sebagai masukan agar kedepannya bisa menjadi lebih baik.
2. Bagi pembaca, diharapkan dapat memberi pengetahuan, pemenuhan informasi, dan referensi atau bahan kajian khususnya tentang penelitian yang akan diteliti ini.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya guna menghasilkan penelitian sejenis yang lebih baik.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Riswan (2014) Universitas Bandar Lampung dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten/Kota Se-Sumatera). Sedangkan penelitian ini berjudul analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio efisiensi pajak daerah terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. Model Penelitian : penelitian terdahulu menggunakan regresi linier sederhana dan penelitian ini juga menggunakan regresi linier berganda.
2. Variable Penelitian : penelitian terdahulu menggunakan 1 (satu) variabel bebas yaitu kinerja keuangan daerah, dan 1 (satu) variabel terikat yaitu belanja modal.

Sedangkan penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi pajak daerah, serta 1(satu) variabel terikat yaitu belanja daerah.

3. Jumlah Observasi/data : peneliti terdahulu menggunakan sampel sebanyak 151 pemerintah daerah se-pulau sumatera dan data pada tahun 2011. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 15 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 11 Kabupaten dan 4 Kota pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dan data pada tahun 2012 sampai 2016.
4. Waktu Penelitian : penelitian terdahulu dilakukan tahun 2014 sedangkan penelitian ini pada tahun 2019.
5. Lokasi Penelitian : lokasi penelitian terdahulu pada pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera, sedangkan penelitian ini dilakukan pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Menurut (Halim, 2008) menyatakan Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda.

Selisih realisasi belanja dengan yang di anggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan, pertama hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Kedua justru sebaliknya, jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut jadi disebabkan karena ada program kegiatan yang tidak dilaksanakan eksekutif padahal sudah diamanatkan dalam anggaran.

Secara normatif, anggaran belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran yang boleh dilakukan. Kinerja pemerintah daerah di nilai baik apabila pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi belanja. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja

anggaran yang kurang baik. Namun harus dikaji lebih lanjut apakah realisasi yang lebih kecil dari anggaran tersebut disebabkan karena kinerja yang baik (*good performance*) ataukah sebaliknya kinerja yang buruk (*bad performance*). Hal itu terjadi karena pengendalian anggaran yang ketat yang dilakukan pemerintah daerah, maka hal itu memang benar-benar merupakan prestasi.

Tetapi jika tidak terserapnya anggaran belanja tersebut disebabkan karena ada program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan atau karena penetapan standar harga satuan yang jauh melebihi nilai pasar, maka hal itu bukan menunjukkan kinerja anggaran yang baik, sehingga penghematan belanja yang ditampilkan merupakan prestasi yang semu. Namun itu pun masih lebih baik daripada terjadi pemborosan anggaran, sebab penghematan anggaran tahun sekarang dapat digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi :

- a. Belanja Langsung ialah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.
- b. Belanja Tidak Langsung ialah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai, belanja



bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota/ dan pemerintahan desa.

Belanja daerah dan pendapatan daerah mempunyai hubungan timbal balik yang unik, menurut (Mankiw, 2006) menyatakan bahwa secara sederhana hubungan tersebut diilustrasikan sebagai rumah tangga menerima pendapatan dan menggunakannya untuk membayar pajak kepada pemerintah, pihak swasta menerima pendapatan dari penjualan barang dan jasa dan menggunakan pendapatan tersebut untuk membayar faktor-faktor produksi serta pajak kepada pemerintah untuk memperoleh pendapatan dari penerimaan pajak dan menggunakannya kembali untuk membayar pengeluaran pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam bentuk investasi demi pelayanan kepada masyarakat serta semakin besarnya manfaat pelayanan tersebut dirasakan oleh masyarakat, maka akan memperbesar penerimaan pajak kepada pemerintah. Dan semakin besar penerimaan pajak akan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

PP Nomor 71 Tahun 2010 berbunyi tentang, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya lebih dari 1 tahun anggaran yang akan menambah aset atau, kekayaan daerah dan selanjutnya juga menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

## 2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

penyajikan laporan keuangan daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sehingga pemerintah dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang secara wajar dan diungkap secara lengkap agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terciptalah transparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan sesuai harapan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan merupakan “laporan terstruktur mengenai laporanposisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Dalam peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyatakan “bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode”.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya . Sedangkan menurut Halim (2009:20) menyatakan bahwa “tujuan pelaporan keuangan daerah adalah menyajikan laporan tentang;

### a. Posisi keuangan

Posisi keuangan atau neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan pada tanggal tertentu (contohnya

akhir bulan, akhir semester, atau akhir tahun). Neraca, disebut juga laporan posisi keuangan, merupakan sumber informasi utama tentang posisi keuangan perusahaan karena neraca merangkum elemen- elemen yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas.

b. Realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisari, sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.

c. Arus kas

Arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, inventasi asset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu.

d. Kinerja pelaporan keuangan

Kinerja pelaporan keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit. Dalam

perkembangan berikutnya, dengan terbitnya UU No. 17 tahun 2003, pada Pasal 31 dinyatakan bahwa laporan keuangan yang harus disajikan oleh kepala daerah setidaknya-tidaknya meliputi:

- 1) Laporan Realisasi APBD
- 2) Neraca

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, inventasi asset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu.

Adapun secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah :

1. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
2. Untuk alat akuntabilitas publik.
3. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Dan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang merupakan salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan pemerintah. Tujuan pelaporan keuangan tersebut adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam



menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, dan ekuitas pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai ketaan realisasi terhadap anggarannya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Sebagian pihak masih berpandangan bahwa penyajian laporan keuangan hanya merupakan formalitas dalam rangka memenuhi ketentuan perundangan saja. Laporan keuangan yang dipublikasikan belum benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, bahkan seringkali keputusan yang dilakukan lebih banyak didasari oleh keputusan politis semata. Investor pun dalam menentukan keputusan berinvestasi sering kali tidak begitu merisaukan kondisi laporan keuangan pemerintah daerah tempat mereka berinvestasi. Keputusan berinvestasi lebih banyak dipengaruhi oleh informasi lain, misalnya

kondisi keamanan daerah, stabilitas politik, kemudahan birokrasi dan peraturan daerah, serta dukungan infrastruktur yang ada.

Kurang dimanfaatkannya laporan keuangan itu karena masih rendahnya budaya akuntabilitas dan budaya membuat laporan keuangan. Penyebab lainnya adalah masih adanya masyarakat yang kurang rasional atau cenderung emosional dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Laporan keuangan akan terasa sekali manfaatnya dikala masyarakat semakin rasional dalam menentukan keputusan ekonomi, sosial dan politik,

Jika laporan keuangan publikasian itu dieksplorasi dan ditelaah secara kritis, maka pembaca laporan akan dapat menangkap berbagai informasi penting di dalamnya. Secara spesifik, manfaat penyajian laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan mempredisikan kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitasnya.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintah dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran.
5. Memberikan informasi mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

- a. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain.
- b. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas operasi, program, aktivitas dan fungsi tertentu di pemerintahan.
- c. Untuk mengevaluasi hasil (outcome) suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian dan tujuan.
- d. Untuk mengevaluasi tingkat pemeretaan dan keadilan (equity & equality).

### **3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Menurut (Halim 2008:L-5) menyatakan bahwa “Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain : bagi hasil pajak, bagi hasil pajakbukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman”.

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\%$$

Adapun kriteria penilaian kemandirian keuangan pemerintah daerah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan**

<b>Kemandirian Keuangan</b>	<b>Kriteria</b>
0-25	Rendah Sekali
25-50	Rendah
50-75	Sedang
75-100	Tinggi

*Sumber :keputusan mendagri No.690.900.327 Tahun 1996 (Halim 2008)*

RKKD menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan dengan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Menurut (Halim, 2008 : 233) menyatakan bahwa Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Menurut (Halim,2008:188) menyatakan bahwa Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam, membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Ada empat macam pola hubungan situasional yang dapat digunakan untuk pelaksanaan otonomi daerah.

- 1) Pola hubungan instruktif  
Dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsulatif  
Yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif  
Peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, menggingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah .
- 4) Pola hubungan delegatif  
Yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

#### 4. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan**

<b>Efektivitas Keuangan (%)</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
Dibawah 60	Tidak Efektif

*Sumber : keputusan Mendagri No.690.900.327 Tahun 1996 (Halim 2008)*



Berdasarkan persamaan diatas dapat dinyatakan bahwa semakin besar realisasi PAD terhadap target penerimaan PAD, maka rasio efektivitas keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya. Semakin tinggi rasio efektivitas keuangan daerah, maka daerah telah menggunakan APBD secara efektif dalam membiayai kegiatan atau program kerja dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya atau sebaliknya.

## 5. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi keuangan daerah adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran daerah dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu sebaliknya. Dalam hal ini mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan.

Menurut Riswan menyatakan bahwa (2014:82) “rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah”. Rasio efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang di keluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Menurut (Halim, 2008:233) menyuatakan bahwa Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari

1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik. Menurut (Halim, 2008:233) menyatakan bahwa Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang di tetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. Adapun kriteria penilaian efisiensi keuangan pemerintah daerah sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan**

<b>Efisiensi Keuangan (%)</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100	Tidak efisien
90-100	Kurang efisien
80-90	Cukup efisien
60-80	Efisien
Dibawah 60	Sangat efisien

*Sumber:Keputusan Mendagri No.690.900.327 Tahun 1996 (Halim 2008)*

## **6. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Halim (2008), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Adapun Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu :

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

”Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

- a. Pajak Provinsi
- b. Pajak Kota/Kabupaten

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi perizinan tertentu

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan untuk diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup 3 bagian dibawah ini.

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang sah.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 yaitu:

Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
- b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu

retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
- e. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- f. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan,



pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

- g. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Analisis PAD ini bermanfaat bagi manajemen pemerintah daerah maupun calon investor untuk memberikan pertimbangan tentang potensi penerimaan yang masih dapat digali dan potensi keuntungan berinvestasi. Analisis potensi PAD dilakukan untuk mengetahui pajak daerah dan retribusi daerah tertentu apakah masuk dalam kategori potensial, prima, berkembang, ataukah terbelakang. Selanjutnya setelah diketahui potensinya tahap berikutnya dapat diambil kebijakan untuk jenis pajak dan retribusi daerah yang dikategorikan potensial dan berkembang dapat dilakukan intensifikasi dan untuk kategori terbelakang dapat dilakukan peninjauan ulang atau bahkan penghapusan.

Semakin besar proporsi pajak atau retribusi dari rata-rata pajak atau retribusi, maka semakin layak pajak atau retribusi tersebut untuk diupayakan peningkatannya dimasa mendatang. Sebaliknya, semakin kecil proporsi pajak atau retribusi tersebut maka upaya identifikasi mengenai kelayakan untuk dijadikan sumber penerimaan dimasa mendatang perlu di intensifkan. Sementara untuk proporsi tambahan, semakin besar proporsi tambahan suatu pajak atau retribusi dari total penerimaan pajak atau

retribusi, maka semakin layak pajak atau retribusi tersebut untuk diupayakan peningkatannya. Sebaliknya, semakin kecil proporsi tambahan suatu jenis pajak atau retribusi maka upaya identifikasi mengenai kelayakan untuk dijadikan sumber penerimaan di masa mendatang perlu diintensifkan.

## B. Penelitian Sebelumnya

**Tabel 2.4 Daftar Penelitian Sebelumnya**

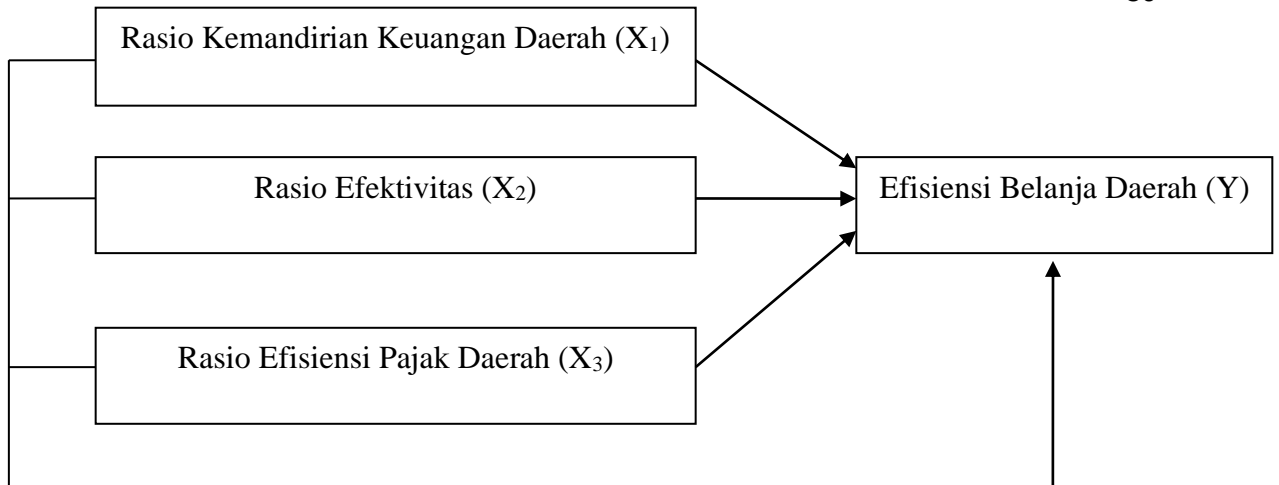
No	Nama peneliti/ta hun	Judul Penelitian	Variable X	Variable Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Riswan (2014)	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten/ Kota Se-Sumatera)	Rasio Kemandirian( $X_1$ ), Rasio Efektifitas ( $X_2$ ), Rasio Efisiensi ( $X_3$ )	Belanja Daerah (Y)	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera
2	Ardhini (2011)	Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja	Rasio Keuangan Daerah ( $X_1$ )	Belanja Modal (y)	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Otonomi

		modal untuk pelayanan publik dalam perspektif teori keagenan (studi pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah)				berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Tingkat efektivitas berpengaruh positif terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Tingkat efisiensi berpengaruh negatif terhadap belanja modal untuk pelayanan publik.
3	Assyurriani (2015)	pengaruh rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Kepulauan Riau tahun 2010 – 2013	Rasio Kemandirian Keuangan daerah ( $X_1$ ), Rasio efektivitas ( $X_2$ ), Rasio Efisiensi ( $X_3$ ), Rasio Efektivitas ( $X_4$ ), Rasio Pertumbuhan ( $X_5$ )	Belanja Modal (Y)	Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio tingkat kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal.

### **C. Kerangka Konseptual**

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan yang mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah Pemerintah Daerah harus mampu untuk mengidentifikasi perkembangan kinerjanya dari tahun ke tahun. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis rasio tersebut dapat dijadikan tolok ukur apakah kinerja Pemerintah Daerah meningkat dari tahun ke tahun, sehingga dapat dikatakan sebagai daerah yang berkembang. Terlebih lagi banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui secara transparan mengenai besarnya dana yang dikeluarkan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, serta pengaruhnya terhadap ukuran kinerja Pemerintah Daerah.



**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

#### **D. Hipotesis**

Menurut (Rusiadi dkk, 2014:74) menyatakan bahwa “Hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel”.

Berdasarkan definisi diatas, maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
2. Rasio efektivitas berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
3. Rasio efisiensi pajak daerah terhadap efisiensi belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
4. Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, dan rasio efesiensi pajak daerah secara simultan terhadap efisiensi belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang bersifat Assosiatif. Menurut Rusiadi (2013:14) penelitian asosiatif/kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antara dua variable atau lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan di bangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara yang diakses melalui website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2018 sampai dengan Agustus 2019. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari uraian dibawah ini.

**Tabel 3.1 Jadwal Penelitian**

No	Aktivitas	Nov-Des 2018				Jan-Mar 2019				Apr 2019		Mei-Juli 2019				September 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Riset awal/Pengajuan Judul	■	■																
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■										
3	Seminar Proposal									■	■								
4	Perbaikan Acc Proposal											■	■	■	■				
5	Pengolahan Data											■	■	■	■				
6	Penyusunan Skripsi											■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi											■	■	■	■				
8	Sidang Meja Hijau															■			



## **C. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data**

### **1. Populasi**

Menurut (Sugiyono 2016:117) menyatakan bahwa Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Jumlah populasi yang digunakann dalam penelitian ini adalah 33 Kabupaten/Kota.

### **2. Sampel**

Menurut (Sugiyono 2013:118) menyatakan bahwa Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling. Menurut Sugiyono (2010) pengertiannya adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.

Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 15 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 11 Kabupaten dan 4 Kota pemerintahan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara dan data pada tahun 2012 sampai 2016.

Adapun kriteria yang ditetapkan penulis dalam pemilihan sampel pada penelitian ini adalah:

- a Kabupaten /Kota yang mempublikasikan Laporan APBD di Sumatera Utara dari tahun 2012-2016 di website [www.sumut.bps.go.id](http://www.sumut.bps.go.id).
- b Kabupaten/Kota yang mempublikasikan Laporan Realisasi APBD dari tahun 2012-2016 di website [www.sumut.bps.go.id](http://www.sumut.bps.go.id).

**Tabel 3.2 Sampel Penelitian**

No	Nama Pemerintah Daerah
1	Kab. Simalungun
2	Kab. Deli Sedang
3	Kab. Langkat
4	Kab. Tapanuli Selatan
5	Kab. Tapanuli Utara
6	Kab. Dairi
7	Kab. Samosir
8	Kab. Asahan
9	Kab. Sibolga
10	Kota. Medan
11	Kota Tebing Tinggi
12	Kota Pematang Siantar
13	Kab. Humbang Hasundutan
14	Kab. Mandailing Natal
15	Kab. Toba Samosir

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi secara *time series*. Menurut Rusiadi,dkk (2014:187) menyatakan bahwa Studi dokumentasi dilakukan untuk mendukung data sekunder. Seperti data perusahaan laporan keuangan dan lainnya , data dokumen biasanya langsung berbentuk data kuantitatif.

## E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

### 1. Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang dioperasikan dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu, variabel rasio kemandirian keuangan daerah (X1), rasio efektifitas (X2) dan rasio efisiensi pajak daerah (X3) serta variabel terikat belanja daerah (Y).

### 2. Definisi Operasional Variabel

Untuk memperjelas dan memudahkan pelaksanaan penelitian, maka perlu diberikan definisi variabel-variabel yang akan diteliti sebagai dasar berikut :

**Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala pengukuran
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1)	Total pendapatan asli daerah terhadap pendapatan transfer  Sumber: Halim,2008:233	$\frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$  Sumber: Halim,2008:233	Rasio
Rasio Efektifitas (X2)	Perbandingan antara realisasi pendapatan asli daerah dengan Anggaran PAD  Sumber: Halim, 2008:233	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$  Sumber: Halim,2008:233	Rasio

Rasio Efisiensi Pajak Daerah (X3)	Perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah  Sumber: Riswan,2014:82	$\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$  Sumber: Riswan,2014:82	Rasio
Belanja Daerah	Semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran  Sumber: Halim,2002	$\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$  Sumber: Halim,2002	Rasio

## F. Teknik Analisa Data

### 1. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik adalah asumsi yang mendasari analisis regresi dengan tujuan mengukur asosiasi atau keterikatan antar variabel bebas. Terdapat 4 (empat) pengujian terkait uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokolerasi.

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Menurut Nugroho (2005:18) menyatakan bahwa data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal". Maksud data yang terdistribusi normal adalah bahwa data akan

mengikuti bentuk distribusi normal dimana datanya memusat pada nilai rata-rata dan median. Alat uji asumsi yang digunakan adalah *Kolmogorov Smirnov Test*. Normalitas data dapat dilihat melalui besarnya *asymptotic significance*. Adapun pedoman pengambilan keputusan kenormalan distribusi adalah sebagai berikut, jika signifikansi atau nilai probabilitas ( $\alpha$ ) < 0,05, maka distribusi tidak normal tapi ( $\alpha$ ) > 0,05, maka distribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Sudarmanto (2013:224) mengatakan bahwa “uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji ada tidaknya korelasi variabel-variabel independen antara yang satu dengan yang lainnya”. Multikolinieritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Metode pengujian yang digunakan yaitu dengan melihat nilai *inflation factor* (VIF) dan *tolerance* pada model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan *tolerance* lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Sudarmanto ,2013:240) menyatakan bahwa Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah variasi residual absolute sama atau tidak sama untuk semua pengamatan. Model regresi yang baik tidak diperbolehkan mengandung heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Menurut (Ghozali,2013:10) menyatakan bahwa Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot, dengan dasar analisis.

d. Uji Auto Korelasi

Autokorelasi adalah kondisi dimana adanya hubungan antar pengamatan atau observasi. Uji asumsi tentang autokorelasi sangat penting untuk dilakukan tidak hanya pada data yang bersifat *time series*, akan tetapi semua data yang diperoleh perlu diuji terlebih dahulu autokorelasinya apabila akan dianalisis dengan regresi linear berganda. Menurut (Ghozali,2013:107) menyatakan Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem autokorelasi. Autokorelasi timbul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Autokorelasi dapat diketahui melalui uji Durbin-Watson (DW test). Jika  $d$  lebih kecil dibandingkan dengan  $dU$  atau lebih besar dari  $4-dU$ , maka  $H_0$  ditolak yang berarti terdapat autokorelasi. Jika  $d$  terletak diantara  $dU$  dan  $4-dU$ , maka  $H_0$  diterima yang berarti tidak ada autokorelasi.

## 2. Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda (multiple regression), dengan rumus persamaan sebagai berikut:

$$EBD = \beta_0 + \beta_1 RKKD + \beta_2 RE + \beta_3 REPD + \varepsilon$$

Keterangan :



EBD : Efisiensi Belanja Daerah (Y)

$\beta_0$  : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien Regresi  $X_1, X_2, X_3$

RKKD ( $X_1$ ) : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

RE ( $X_2$ ) : Rasio Efektivitas

REPD ( $X_3$ ) : Rasio Efisiensi Pajak Daerah

$\varepsilon$  (epsilon) : Error term/Tingkat Kesalahan

### 3. Uji Kesesuaian

#### a. Uji T

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji T merupakan metode pengujian hipotesis secara parsial terhadap koefisien regresi yaitu dengan membandingkan nilai statistik masing-masing koefisien regresi dengan nilai t tabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan.

#### b. Uji F

Untuk menguji hipotesis penelitian ini digunakan uji F untuk melihat pengaruh secara serempak variabel-variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3$ ) terhadap variabel terikat (Y), pada tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan = 0,05 (5%), dengan kriteria sebagai berikut:

Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima.

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_1$  diterima.

**c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Menurut (Ghozali,2013:171) menyatakan bahwa “Koefisien determinasi merupakan ikhtisar yang menyatakan seberapa baik garis regresi mencocokkan data.” Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 sampai 1. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara**

Sumatera Utara berdiri pada tanggal 15 April 1948 dengan wilayah mencakup tiga keresidenan, yaitu Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Pada saat itu ibukota dari Sumatera Utara adalah Kutaraja yang sekarang menjadi banda Aceh, dan dikepalai oleh seorang gubernur. Gubernur Sumatera Utara yang pertama adalah Mr. S.M. Amin. Awal tahun 1949 diadakan reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan keputusan Pemerintah Darurat RI tanggal 17 mei 1949 Nomor 22/Pem/PDRI yang mengatakan bahwa jabatan gubernur Sumatera Utara di tiadakan, selanjutnya dengan ketetapan pemerintah Darurat RI tanggal 17 Desember 1949 di bentuk provinsi Aceh dan provinsi Tapanuli atau Sumatera Timur yang kemudian dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 5 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan ini dicabut dan kembali dibentuk provinsi Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis  $1^0 - 4^0$  Lintang Utara dan  $98^0 - 100^0$  Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan provinsi Aceh, sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Luas daratan provinsi Sumatra Utara adalah

71.680,68 Km<sup>2</sup>, sebagian besar berada di daratan pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di pulau Nias, pulau – pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian Barat maupun di bagian Timur pantau pulau Sumatera. Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.620,70 Km<sup>2</sup>, atau sekitar 9,23% dari total luas Sumatera utara, diikuti kabupaten Langkat dengan luas 6.263,29 Km<sup>2</sup> atau 8,74%, kemudian kabupaten Simalunggun dengan luas 4.386,60 Km<sup>2</sup> atau sekitar 6,12%.

Sedangkan luas daerah terkecil adalah kota Sibolga dengan luas 10,77 Km<sup>2</sup> atau sekitar 0,02% dari total luas wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur. Kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kota Sibolga, dan Kota Gunung Sitoli. Kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalunggun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, dan Kota Pematang Siantar. Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai.

Dengan diterbitnya Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi provinsi Sumatera Utara. Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera Utara. Dengan keputusan Pemerintah Darurat R.I Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara diadakan.

## **2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara**

Untuk mewujudkan pembangunan provinsi Sumatera Utara yang lebih terarah, terencana, menyeluruh, terpadu, realistis, dan dapat dievaluasi, maka perlu dirumuskan rencana strategi sebagai *broad guide line* penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di provinsi Sumatera Utara untuk lima tahun kedepan.

### **a. Visi Provinsi Sumatera Utara**

*“Sumatera Utara yang Maju dan Sejahtera dalam Harmoni Keberagaman”.*

### **b. Misi Provinsi Sumatera Utara**

“tujuan dan saran yang ingin dicapai dalam pembangunan provinsi sehingga diharapkan seluruh *stakeholder* dapat mengetahui dan memahami kedudukan dan peran masing-masing masyarakat dalam pembangunan”.

### **3. Data Penelitian**

Data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yaitu pada tahun 2012-2016, sehingga jumlah sampel menjadi 75. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota medan yaitu [www.sumut.bps.go.id](http://www.sumut.bps.go.id). Metode penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik dengan menggunakan model regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dari variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau variabel independen.

Analisis data dimulai dengan mengolah data menggunakan SPSS versi 20.0 selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Prosedur dimulai dengan memasukkan semua variabel independen dan variabel dependen ke program SPSS tersebut dan menghasilkan output-output sesuai dengan metoden analisis data yang telah ditentukan.

### **4. Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Untuk memberikan gambaran data pada variabel penelitian yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan rasio efesiensi pajak daerah terhadap belanja daerah. Maka dapat dijelaskan dengan analisis deskriptif yang

meliputi nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Berikut ini akan dijelaskan analisis deskriptif yaitu menjelaskan deskripsi data dari seluruh variabel yang akan dimasukkan dalam model penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Deskriptif Statistik**

	Mean	Std. Deviation	N
Belanja_Daerah	13.8601	.58232	75
Rasi_Kemandirian	27.6767	19.28450	75
Rasio_Efektifitas	112.1372	39.69578	75
Rasio_Efisiensi_Pajak_Daerah	545.8293	424.27191	75

Dengan melihat nilai rata-rata (*mean*) variabel RKKD sebesar 27,6 dan standar deviasi sebesar 19,2 . Hal ini diartikan bahwa data variabel RKKD dapat dikatakan baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada nilai rata-ratanya (*mean*).

Dengan melihat nilai rata-rata (*mean*) variabel Rasio Efektivitas sebesar 112,1 dan standar deviasi sebesar 39,6. Hal ini diartikan bahwa data variabel Rasio Efektivitas dapat dikatakan baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada nilai rata-ratanya (*mean*).

Dengan melihat nilai rata-rata (*mean*) variabel Rasio Efisiensi Pajak Daerah sebesar 545,8 dan standar deviasi sebesar 424,2. Hal ini diartikan bahwa data variabel Rasio Efisiensi Pajak Daerah dapat dikatakan baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada nilai rata-ratanya (*mean*).

## 5. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi variabel residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini pengujian normalitas dideteksi dengan metode nonvisualisasi yang menggunakan uji *kolmogrov smirnov* (Uji K-S) dan melalui analisis grafik yang dihasilkan melalui SPSS.

Uji K-S memiliki ketentuan, apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0.05 maka  $H_0$  diterima, sedangkan jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0.05 maka  $H_0$  ditolak. Adapun hasil uji normalitas dengan menggunakan model *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* adalah seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.53815647
Most Extreme Differences	Absolute	.124
	Positive	.124
	Negative	-.080
Kolmogorov-Smirnov Z		1.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

a. Test distribution is Normal.

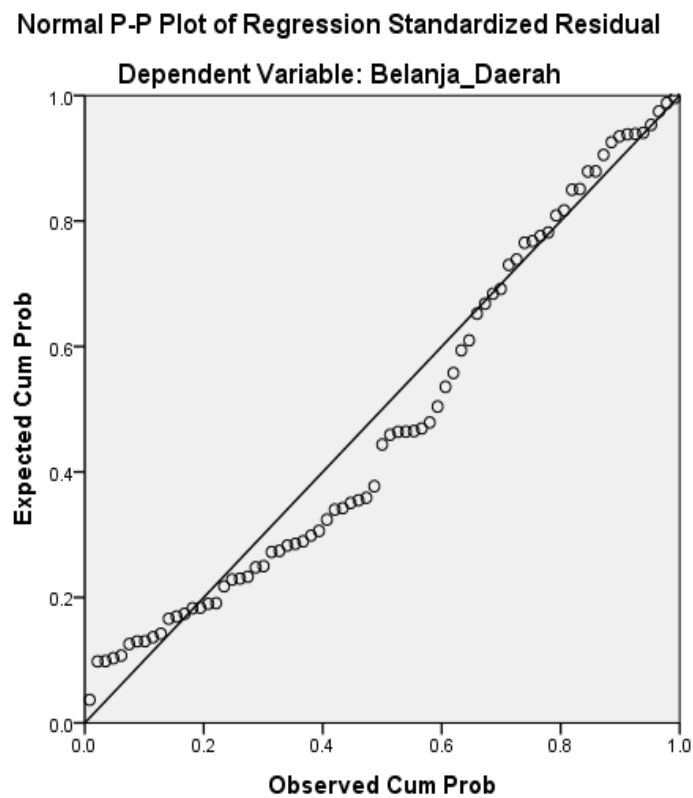
b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 20 (2016)

Dari hasil pengolahan data tersebut, besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* atas Rasio Kemandirian keuangan daerah, Rasio efektivitas, Rasio Efisiensi Pajak Daerah dan Belanja Daerah dihitung dengan menggunakan nilai *unstandardized residual* adalah sebesar 0,200. Hasil nilai *asympt. Significant (2 tailed)* > 0,05. Setelah melihat tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa perhitungan *Kolmogorov-*

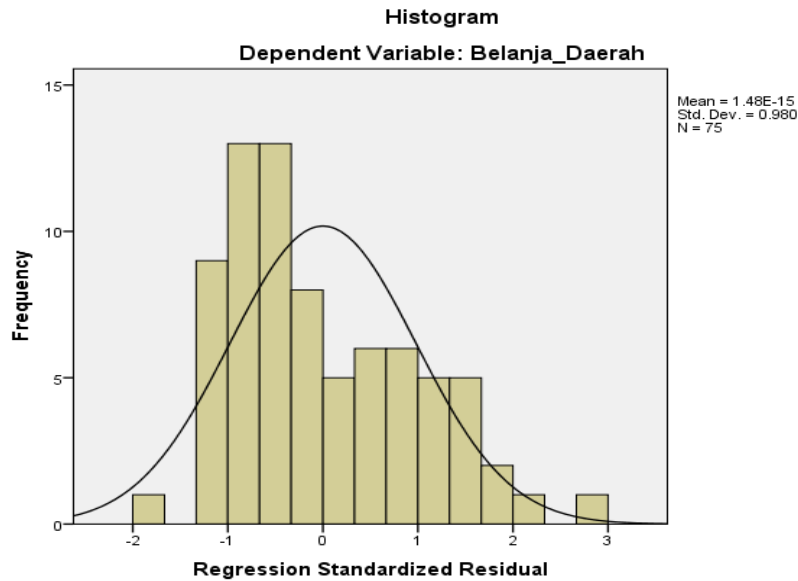


*Smirnov (K-S)* menunjukkan data dalam model regresi terdistribusi secara normal, dimana nilai signifikansinya lebih dari 0.05. Dimana  $\alpha = 0.05$  (*asympt.Sig* = 0.200 > 0.05) dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi data telah terdistribusi secara normal dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya. Untuk lebih jelas, berikut ini ditampilkan grafik histogram dan plot data yang terdistribusi normal.



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 20 (2016)

**Gambar 4.1 Grafik Normal P-Plot**



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 20 (2015)

**Gambar 4.2 Histogram**

Dengan cara membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal karena grafik histogram menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal yang tidak menceng (*skewness*) ke kiri maupun ke kanan atau normal. Demikian pula dengan hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik plot. Pada grafik normal plot, terlihat titik data berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini sudah terdistribusi dengan normal atau sudah memenuhi asumsi normalitas.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen.

Dalam penelitian ini akan dilakukan uji multikolinearitas dengan cara melihat nilai *tolerance* dan VIF-nya. Dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika *tolerance* > 0,1 atau VIF < 10. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, digunakan ketentuan sebagai berikut: jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10, maka terjadi masalah multikolinearitas.

Apabila VIF > 10, maka ada multikolinearitas.

Apabila VIF < 10, maka tidak ada multikolinearitas.

**Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Rasi_Kemandirian	.990	1.010
Rasio_Efektifitas	.971	1.030
Rasio_Efisiensi_Pajak_Daerah	.962	1.040

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 20 (2016)

Berdasarkan hasil pengujian *collinearity statistics* pada tabel 4.3 Dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Nilai *tolerance* dari Rasio Kemandirian keuangan daerah sebesar 0.990 dan nilai *VIF* dari Rasio Kemandirian keuangan daerah sebesar 1.010 Sehingga hasil uji statistik nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* lebih kecil dari 0.10 dan demikian juga hasil perhitungan *variance inflation factor* (*VIF*) menunjukkan nilai *VIF* lebih kecil dari 10.
2. Nilai *tolerance* dari Rasio Efektivitas sebesar 0.971 dan nilai *VIF* dari Rasio efektivitas sebesar 1.030. Sehingga hasil uji statistik nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance*

lebih kecil dari 0.10 dan demikian juga hasil perhitungan *variance inflation factor (VIF)* menunjukkan nilai *VIF* lebih kecil dari 10.

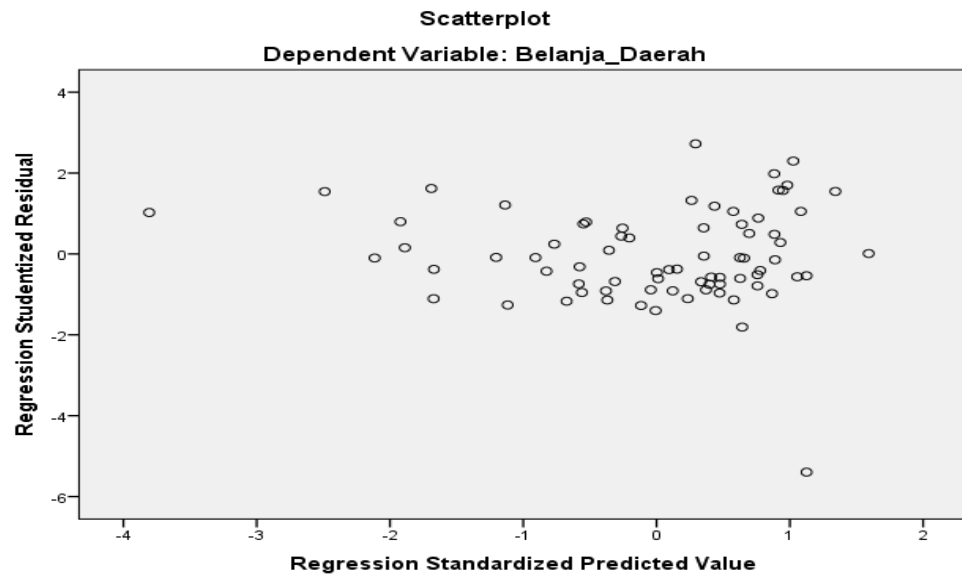
3. Nilai *tolerance* dari Rasio Efisiensi Pajak daerah sebesar 0.962 dan nilai *VIF* dari Rasio Efisiensi Pajak daerah sebesar 1.040. Sehingga hasil uji statistik nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* lebih kecil dari 0.10 dan demikian juga hasil perhitungan *variance inflation factor (VIF)* menunjukkan nilai *VIF* lebih kecil dari 10.

### c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari suatu pengamatan. Jika varians residual antara satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, tetapi jika varians berbeda maka disebut heterokedastisitas. Mendeteksi apakah ada atau tidak gejala heterokedastisitas dapat dilakukan dengan hasil program SPSS dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika ada tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka terjadi heterokedastisitas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat dalam gambar berikut:



**Gambar 4.3 Scatterplot Heterokedastisitas**

Berdasarkan Gambar 4.3 terlihat titik secara acak tidak membentuk pola tertentu yang jelas, secara tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu *Regression Studentized Residual* (Y). Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi ini layak dipakai untuk prediksi belanja daerah berdasarkan masukan variabel independennya (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pajak Daerah).

#### **d. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi pada penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  atau sebelumnya. Masalah autokorelasi pada umumnya terjadi pada regresi yang datanya *time series*.

Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi terjadi karena data observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama

lain. Menurut (Ghozali, 2013:110) mengatakan bahwa Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi.

Setelah dilakukan uji statistik terhadap model regresi dalam bentuk linier, maka diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1.760 dan berada pada daerah *No Autocorelation* yaitu diantara nilai 1 dan 2 yang artinya tidak terjadi autokorelasi pada model regresi. Ringkasan dari uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.4, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Pengujian Autokorelasi**

/Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.482 <sup>a</sup>	.446	.410	.54941	1.760

a. Predictors: (Constant), Rasio\_Efisiensi\_Pajak\_Daerah, Rasi\_Kemandirian, Rasio\_Efektifitas

b. Dependent Variable: Belanja\_Daerah

#### e. Analisis Regresi

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.5 Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14.439	.205		70.336	.000
1 Rasi_Kemandirian	.073	.087	.052	.471	.639
Rasio_Efektifitas	-.421	.213	-.298	-2.681	.009
Rasio_Efisiensi_Pajak_Daerah	-.243	.120	-.283	-2.529	.014

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 20 (2016)

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan daerah, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pajak Daerah terhadap efisiensi belanja Daerah dihitung dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Product and Service*

*Solution* (SPSS Versi 20). Berdasarkan Tabel 4.5 di atas diperoleh persamaan regresinya adalah

$$\mathbf{BM = 14.439 + 0.073 \text{ Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} + -0.421 \text{ Rasio Efektivitas} + -0.243 \text{ Rasio Efisiensi Pajak Daerah}}$$

Konstanta sebesar 14.439 menyatakan jika tidak ada variabel bebas (bernilai nol) maka variabel terikat sebesar 14.439. Untuk melihat keterangan hubungan kedua variabel digunakan rumus Uji t.

Adapun penjabaran dari persamaan diatas sebagai berikut:

a.  $\beta_0 = +14.439$

Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pajak Daerah bernilai positif, maka memiliki pengaruh terhadap efisiensi belanja daerah .

b.  $\beta_1 = 0.073$

Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah bernilai positif, maka memiliki pengaruh terhadap efisiensi belanja daerah .

c.  $\beta_2 = -0.421$

Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa variabel Rasio Efektivitas bernilai negatif, maka memiliki pengaruh terhadap efisiensi belanja daerah .

c.  $\beta_3 = -0.243$

Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa variabel Rasio Efisiensi Pajak Daerah bernilai negatif, maka memiliki pengaruh terhadap efisiensi belanja daerah .

## 6. Pengujian Hipotesis

### a. Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji Pengaruh Parsial (uji t) digunakan untuk menguji secara parsial (individu) seberapa besar pengaruh variabel bebas (Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan Rasio efisiensi pajak daerah) terhadap variabel terikat (belanja daerah) pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Untuk melakukan uji-t maka menggunakan Tabel *Coefficients* pada tabel 4.5

- a. Uji hipotesis pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan daerah terhadap belanja daerah.

Hipotesis 1 ( $H_1$ ) : rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dari perhitungan uji t (parsial) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  rasio kemandirian keuangan daerah yakni sebesar  $T_{hitung} 0,471 < T_{tabel} 1,666$ . Dan nilai signifikansi ( $0,639 > 0,05$ ). Maka dapat dikatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Y) tidak dapat diterima.

- b. Uji hipotesis pengaruh rasio efektivitas terhadap belanja daerah.

Hipotesis 2 ( $H_2$ ) : Rasio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dari perhitungan uji t (parsial) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  rasio efektivitas yakni sebesar  $T_{hitung} -2681 < T_{tabel} 1,666$ . Dan nilai signifikansi ( $0,009 < 0,05$ ). Maka dapat dikatakan bahwa rasio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap Belanja daerah sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa rasio



efektivitas memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Y) dapat diterima.

- c. Uji hipotesis pengaruh rasio efisiensi pajak daerah terhadap belanja daerah.

Hipotesis 3 (H<sub>3</sub>) : Rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Dari perhitungan uji t (parsial) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  rasio efisiensi pajak daerah yakni sebesar  $T_{hitung} -2529 < T_{tabel} 1,666$ . Dan nilai signifikansi ( $0,014 < 0,05$ ). Maka dapat dikatakan bahwa rasio efisiensi pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa rasio efisiensi pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Y) dapat diterima.

#### b. Uji Pengaruh dalam Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan apakah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi pajak daerah berikut ini hasil Uji F adalah :

**Tabel 4.6 ANOVA<sup>b</sup>**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.662	3	1.221	4.044	.010 <sup>b</sup>
	Residual	21.431	71	.302		
	Total	25.093	74			

a. Dependent Variable: Belanja\_Daerah

b. Predictors: (Constant), Rasio\_Efisiensi\_Pajak\_Daerah, Rasi\_Kemandirian, Rasio\_Efektifitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 20 (2016)

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas bahwa uji Anova atau Uji F menghasilkan nilai  $F_{hitung} 4.044 > F_{tabel} 2,34$  dan probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu  $0.010 < 0,05$  maka model regresi dapat dikatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah,

rasio efektivitas dan rasio efisiensi pajak daerah secara serempak berpengaruh dan signifikan terhadap belanja daerah. Dengan demikian hipotesis sebelumnya ( $H_a$  diterima dan  $H_o$  tolak).

### c. Pengujian Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian determinasi bertujuan mengetahui seberapa besar variabel bebas (rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi pajak daerah) menjelaskan variabel belanja daerah. Adapun hasil penelitian berdasarkan bantuan program SPSS sebagai berikut:

**Tabel 4.7 Model Summary<sup>b</sup>**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.482 <sup>a</sup>	.446	.410	.54941	1.760

a. Predictors: (Constant), Rasio\_Efisiensi\_Pajak\_Daerah, Rasio\_Kemandirian, Rasio\_Efektivitas

b. Dependent Variable: Belanja\_Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 20 (2016)

Berdasarkan Tabel 4.7 diperoleh bahwa angka *R Square* 0,446 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 44,6% belanja daerah dapat diperoleh dan dijelaskan oleh rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi pajak daerah sedangkan sisanya adalah (100% - 44,6% = 55,4%) dijelaskan oleh pengaruh faktor lain atau variabel diluar model seperti seperti sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus, dan lain sebagainya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Hubungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. nilai  $t_{hitung}$  rasio kemandirian keuangan daerah yakni sebesar  $T_{hitung} 0,471 < T_{tabel} 1,666$ . Dan nilai signifikansi ( $0,639 > 0,05$ ).

Hal ini sejalan dengan penelitian Assyurriani (2015) yang menyatakan bahwa “Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah”. Berbanding terbalik dengan penelitian Cicilia (2015) yang menyatakan bahwa “rasio kemandirian keuangan daerah terbukti signifikan terhadap belanja daerah”.

Hal ini dapat diartikan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap belanja daerah, karena rasio kemandirian keuangan daerah yang dimiliki Kabupaten/Kota di Sumatera Utara belum memiliki porsi yang cukup untuk mempengaruhi belanja daerah. Ini disebabkan karena pemerintah daerah masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat seperti DAU, DAK, dan DBH.

Masalah kemandirian keuangan daerah merupakan utama bagi banyak daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, karena pelaksanaan pembangunan akan berjalan lancar kalau didukung dengan keuangan (dana) yang memadai. Tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan rasio ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah

mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

Demikian pula sebaliknya semakin rendah rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti dimana tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, provinsi ataupun asing semakin tinggi. Rasio ini juga menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dimana semakin rendah pula partisipasi masyarakat pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerahnya. Salah satu alasan mendasar adanya otonomi daerah adalah untuk mewujudkan daerah untuk memiliki keterbukaan dan kemandirian ddi daerahnya sendiri.

Pemerintah tingkat Kabupaten diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang dditetapkan Peraturan Pemerintah

## **2. Hubungan Rasio Efektivitas terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, bahwa Rasio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hasil pengujian hipotesis diketahui nilai  $t_{hitung}$  rasio efektivitas yakni sebesar  $T_{hitung} -2681 < T_{tabel} 1,666$ . Dan nilai signifikansi ( $0,009 < 0,05$ ).

Hal ini sejalan dengan penelitian Ardhini (2011:17) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal. Kemampuan kabupaten dan kota di daerah Provinsi Sumatera Utara jika dilihat dari rasio efektivitas PAD

tergolong sangat efektif. Sesuai dengan kategori efektivitas PAD yang dinyatakan dalam Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa tingkat efektivitas PAD >100% termasuk dalam kategori sangat efektif.

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran atau tujuan. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka efektivitas pemungutan pajak adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

### **3. Hubungan Rasio Efisiensi Pajak daerah terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, Rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil pengujian hipotesis diketahui nilai  $t_{hitung}$  rasio efisiensi pajak daerah yakni sebesar  $T_{hitung} -2529 < T_{tabel} 1,666$ . Dan nilai signifikansi ( $0,014 < 0,05$ ). Kemampuan kabupaten dan kota di daerah Provinsi Sumatera Utara jika dilihat dari rasio efisiensi pajak daerah tergolong efisien.

Hasil ini sejalan dengan Penelitian Novianto (2016:18) yang menyatakan bahwa ” rasio efisiensi berpengaruh terhadap belanja modal”.

Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 efisiensi adalah hubungan antara masukan (input) dengan keluaran (output) , efisiensi merupakan ukuran apakah

penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai tujuan organisasi tertentu. Sedangkan efisien berhubungan erat dengan konsep produktifitas.

#### **4. Hubungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi Pajak daerah secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, bahwa rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas , dan rasio efisiensi pajak daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2012 sampai dengan 2016. Dimana  $F_{hitung} 4.044 > F_{tabel} 2,34$  dan probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu  $0.010 < 0,05$ .

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Novianto (2016:8) yang membuktikan bahwa “rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal”.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan terhadap Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, serta berdasarkan teori yang mendasari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Rasio kemandirian keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Sedangkan Rasio efektivitas dan Rasio efisiensi pajak daerah berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
2. Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi pajak daerah secara simultan berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
3. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa 44,6% belanja daerah dapat dijelaskan oleh rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi pajak daerah sedangkan sisanya adalah 55,4% dijelaskan oleh pengaruh faktor lain atau variabel diluar model seperti sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus, dan lain sebagainya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka ada beberapa saran yang akan penulis ajukan untuk menjadi masukan:

### **1. Untuk Pemerintah**

Bagi Pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan belanja langsung khususnya belanja daerah dengan lebih baik agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan asas otonomi daerah. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan bisa meningkatkan dan melampaui Rasio efektivitas , dan Rasio Efisiensi pajak daerah serta Rasio kemandirian keuangan daerah sesuai sehingga diharapkan belanja daerah juga dapat teralokasi dengan lebih baik lagi.

### **2. Para Peneliti Selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah". *Jurnal Universitas Diponegoro, Semarang* , 26 november 2013.
- Assyurriani, Raja. 2015. "Pengaruh Rasio tingkat kemandirian daerah, rasio efektifitas, rasio efektifitas, rasio aktifitas, rasio pertumbuhan secara bersamaan berpengaruh terhadap belanja modal di Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Kepulauan Riau Tahun 2010-2013". *Jurnal, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang*.
- Chrisna, H. (2019). Analisis Kesiapan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Unpab Dalam Konvergensi IFRS (*International Financial Reporting Standard*). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 1-11.
- Dwilita, H. (2019). Perbandingan Kinerja Perbankan Indonesia Studi Pada Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2017. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 145-162.
- Fadly, Y. (2015). Kondisi dan Kritik Sosial pada Masa Rezim Orde Baru dalam Puisi-Puisi WS Rendra.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafidh, Aula Ahmad. 2013. "Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik bagi Pertumbuhan Ekonomi". *Jurnal, Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3*. JAKARTA: Salemba Empat.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

- Maisyarah, R., & Sofyardi, M. (2018, January). *The Effect of Rice Subsidyon The Expenditure of Public Family Consumption And Welfare of Poor Households. In Ist Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017). Atlantis Press.*
- Mankiw N,Gregory. 2006. *Makro Ekonomi*, Terjemahan: Fitria Liza, Imam Nurmawan, Jakarta: Penerbit Erlangga. 2006,195.
- Nasution, A. P. (2018). Pengaruh *Independence In Fact & Independence In Appearance* Dalam Mempertahankan Sikap Independensi Pada Internal Auditor Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 154-164.
- Nasution, A. P. (2019). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 207-224.
- Nasution, D. A. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah-Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 101-114.
- Nasution, N. A. (2019). Tata cara pelaporan pajak terhutang surat pemberitahuan masa terhadap pajak pertambahan nilai pada Cv. Bina rekayasa. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 37-53.
- Novianto . 2016. “Pengaruh Rasio kemandirian daerah, Rasio efektivitas, Rasio efisiensi dan Rasio ketergantungan daerah terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014”. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Nugroho, Bhuono Agung, “*Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*”, ANDI, Yogyakarta, 2005.
- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(2), 151-159.
- Riswan. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Prespektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten/Kota Se-Sumatera). Universitas Bandar Lampung.

- Rizkina, M. (2019). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderating. *JURNAL PERPAJAKAN*, 1(1), 80-94.
- Rusiadi, dkk. (2014). *Metode Penelitian*. Medan: USU Press.
- Rusiadi, dkk. 2013. *Metode Penelitian, Manajemen Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan, Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos, Lisrel*. Medan: USU Press.
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (*Fintech*) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.
- Setiawan, A., Rini, E. S., Sadalia, I., & Daulay, M. T. (2019). 3. Analysis of Murabahah Financing Marketing Strategy at PT BPRS Amanah Insan Cita, Medan, North Sumatra, Indonesia. *International Journal of Science and Business*, 64-73.
- Sudarmanto, Gunawan, 2013. *Statistik Terapan Berbasis Komputer dengan Program IBM SPSS Statistic 19*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sularso, dkk. 2011. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah". *Media Riset Akuntansi*. Universitas Jendral Soedirman. Vol. 1.No. 2.
- Vanesa, Y. Y., Matondang, R., Sadalia, I., & Daulay, M. T. (2019). 11. The Influence Of Organizational Culture, Work Environment And Work Motivation On Employee Discipline In PT Jasa Marga (Persero) TBK, Medan Branch, North Sumatra, Indonesia. *American International Journal of Business Management (AIJBM)*, 37-45.
- Wakhyuni, E., Setiawan, A., Adnalin, A., Sari, D. S., Pane, D. N., Lestario, F., et al. (2018). ROLE OF FOREIGN CULTURE AND COMMUNITY IN PRESERVING CULTURAL RESILIENCE. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 508-516.

Yunus, R. N. (2018). Analisis Pengaruh Bahasa Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Jurusan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 13-20.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RepublikIndonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53. Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Belanja Modal. RepublikIndonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Badan Pusat Statistik website [www.sumut.bps.go.id](http://www.sumut.bps.go.id)